

Tanggapan pribadi tentang RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara / RUU Komponen Pendukung Pertahanan Negara

Setelah mempelajari draft RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara / RUU Komponen Pendukung Pertahanan Negara (saya mendapatkan 2 versi draft RUU yang isinya sama namun hanya berbeda pada penyebutan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung) dan juga setelah membaca pendapat, komentar dan tanggapan para tokoh, pakar, dari politisi, anggota dewan sampai purnawirawan TNI, saya berpendapat bahwa usulan akan Konsep Komponen Cadangan Pertahanan Negara merupakan salah satu solusi yang logis. RUU ini yang lebih mudah dicerna sebagai RUU Wajib militer hemat saya merupakan sebagai tindakan preventif apabila negara sewaktu-waktu terdapat ancaman dari luar. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah untuk menjalankan program ini biaya yang akan dikeluarkan tentulah tidak sedikit. Banyak kalangan yang berpendapat daripada digunakan untuk pembiayaan wajib militer lebih baik dana tersebut untuk kesejahteraan prajurit dan untuk peningkatan kemampuan strategis militer seperti persenjataan dan fasilitas. Sebuah dilema memang disatu pihak wajib militer merupakan solusi namun dilain pihak pro dan kontra semakin menjadi. Lalu bagaimana jalan keluarnya. Menurut pandangan saya, pertama RUU ini harus dikaji mendalam dengan melibatkan banyak pihak demin mendapatkan hasil yang benar-benar matang dan menjadi *win-win solution*. *Win-win solution* disini dapat diartikan bahwa pemerintah disamping mengalokasikan anggaran untuk wajib militer juga dibarengi dengan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan prajurit dan peningkatan kemampuan militer. Selanjutnya Mengingat bahwa ancaman pertahanan di masa sekarang dan akan datang cenderung bersifat ancaman udara, dan juga ancaman laut karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sedangkan wajib militer yang ramai dibicarakan saat ini adalah cadangan pertahanan darat, maka dalam pandangan saya penerapan wajib militer belum perlu diwajibkan kepada semua warga negara yang masuk dalam usia wajib militer (menurut RUU 18-45 tahun). Wajib militer disini adalah pemantapan komponen cadangan dari unsur para militer. Biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir terutama untuk pelatihan karena unsur paramiliter seperti satuan pertahanan sipil (hansip), resimen mahasiswa (menwa), satuan pengaman (satpam), satuan perlindungan masyarakat (linmas), ataupun satuan keamanan lain seperti satpam atau *security* biasanya sudah dibekali dengan dasar-dasar kemiliteran. Atau bisa juga wajib militer ini bersifat sukarela seperti yang diterapkan di AS sehingga biaya yang dikeluarkan tidak akan sebanyak apabila mewajibkan ratusan juta warga negara yang masuk usia 18-45 tahun. Selanjutnya penerapannya pun tidak serta merta, perlu dilakukan bertahap.